

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN
KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI KOTA BATAM**
*(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau)*

SKRIPSI



Oleh.

JANTER TULUS HASIHOLAN

140710039

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN
KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI KOTA BATAM**
*(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau)*

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh.

**JANTER TULUS HASIHOLAN
140710039**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putra Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 28 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,

JANTER TULUS HASIHOLAN

140710039

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN
KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI KOTA BATAM**
*(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau)*

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh.

**JANTER TULUS HASIHOLAN
140710039**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 16 Maret 2018

PADRISAN JAMBA, SH, MH

Pembimbing

ABSTRAK

Kawasan hutan lindung di Kota Batam ditetapkan Pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi yang sangat penting sebagai *cathment area* demi menjamin ketersediaan kebutuhan air baku di Kota Batam sehingga wajib di jaga dan dipertahankan dari segala bentuk perbuatan perusakan hutan berupa pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Salah satu aspek penting dalam pengamanan dan perlindungan hutan adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dimana evektivitas sebuah aturan hukum pidana dapat dinilai dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan sebuah aturan perundang-undangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji bagaimanakah pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung dan mengetahui faktor-faktor hambatan pencegahan pembukaan lahan sehingga masih terjadinya kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan lindung secara tidak sah di Kota Batam. Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk mengetahui sejauh mana upaya pencegahan pembukaan lahan kawasan hutan lindung yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan mengetahui faktor penghambat pencegahan pembukaan lahan sehingga masih terjadi kegiatan pembukaan kawasan hutan lindung di Kota Batam serta masukan dan saran-saran perbaikan yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan yang diteliti demi keberhasilan kegiatan dan pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan.

Kata Kunci : Pencegahan Tindak Pidana, Kawasan Hutan Lindung Kota Batam

ABSTRACT

Protected forest area in Batam City is stipulated by the Government to be maintained as a permanent forest area with a very important function as a cathment area in order to guarantee the availability of raw water needs in Batam City so that it must be guarded and defended from all forms of deforestation in the form of land clearing and / or use forest area illegally. One important aspect of forest protection and protection is the prevention of criminal offenses in which the evolution of a criminal code can be assessed from the level of public compliance in implementing a legislation. This research is intended to see and assess how prevention of criminal acts of land clearing and / or illegal use of forest area in protected forest area and to know the obstacle factors preventing land clearing so that the activity of land clearing and / or the use of protected forest area is not valid in Batam City. While this research is done by using research method of juridical empirical law to know how far effort of prevention of clearing of forest area that have been done by Forestry Department of Environment and Forestry Province of Riau Islands and knowing factors hamper prevention of land clearing so that still happening activity of forest area opening in Kota Batam as well as suggestions and improvements that must be made in an effort to overcome the problems examined for the success of activities and implementation of forest protection and protection.

Keywords : *Prevention of Crime, Protected Forest Area of Batam City*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu DR. Nur Elvi Husda S.Kom., M.Si, selaku Rektor Universitas Putra Batam,
2. Bapak Suhardianto, S.Hum, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi ini.
4. Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan seluruh Staf Universitas Putra Batam.
5. Ibu tercinta (A. Br. Sianipar) dan Bapak Mertua tercinta (K. Tambunan) yang senantiasa mendoakan kami dalam melakukan segala tugas dan kegiatanku setiap saat hingga berhasil baik.

6. Istriku tercinta (E.F Br. Tambunan) dan anak-anakku tersayang (Anabel Artha Melinda Manik, Jhonatan Kennedy Manik dan Joey Manuel Manik) yang senantiasa sabar dan mendukung segala aktivitas selama perkuliahan.
7. Abangku terhormat (Doran Harahap dan Nasrul Lubis) yang selalu mendukung dan membantu segala keperluan selama perkuliahan.
8. Pimpinan dan Staf serta seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah membantu pelaksanaan penelitian skripsi ini.
9. Pimpinan dan Staf serta seluruh jajaran Dinas Perikanan selaku rekan kerja di Pemerintah Kota Batam
10. Saudara dan sahabatku terkasih yang tak dapat disebutkan satu persatu dan telah mendukung dan membantu segala keperluan dan kebutuhan selama proses perkuliahan hingga berakhir.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya. Amin.

Batam, 28 Januari 2018

JANTER TULUS HASIROLAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Batasan Masalah.....	12
1.4. Rumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Penelitian	13
1.6. Manfaat Penelitian	13
1.6.1. Manfaat Teoritis	13
1.6.2. Manfaat Praktis	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Keangka Teori.....	17
2.1.1. Tinjauan Yuridis	17

2.1.2. Tindak Pidana	18
2.1.3. Pembukaan Kawasan Hutan Lindung Secara Tidak Sah	19
2.1.4. Pencegahan dan Efektivitas Hukum Pidana.....	21
2.2. Kerangka Yuridis	25
2.2.1. Hutan dan Kawasan Hutan.....	26
2.2.2. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	34
3.2. Metode Pengumpulan Data	36
3.2.1. Jenis Data	37
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	38
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	39
3.3. Metode Analisis Data.....	40
3.4. Penelitian Terdahulu	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	48
4.1.1. Pelaksanaan Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam.....	48
4.1.2. Faktor Penghambat Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam	60
4.2. Pembahasan.....	67
4.2.1. Pelaksanaan Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam.....	68
4.2.2. Faktor Penghambat Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam	79

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	86
5.1.1. Pelaksanaan Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam.....	86

5.1.2. Faktor Penghambat Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan	
Hutan Lindung di Kota Batam	86
5.2. Saran.....	87
5.2.1. Pelaksanaan Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan	
Lindung di Kota Batam.....	87
5.2.2. Faktor Penghambat Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan	
Hutan Lindung di Kota Batam	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	120
Gambar 4.2. Kondisi dan Keadaan Pembukaan Lahan Hutan Lindung	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.1. SK Menteri Kehutanan RI Nomor 427/Kpts-II/92	92
Lampiran 4.2. SK Menteri Kehutanan RI Nomor 428/Kpts-II/92	94
Lampiran 4.3. SK Menteri Kehutanan RI Nomor 719/Kpts-II/93	96
Lampiran 4.4. SK Menteri Kehutanan RI Nomor 202/Kpts-II/1994	98
Lampiran 4.5. Surat Menteri Kehutanan RI Nomor 424/Menhut-II/2002	101
Lampiran 4.6. SK Menteri LHK RI Nomor SK.76/MenLHK-II/2015	103
Lampiran 4.7. Permohonan Ijin Penelitian ke Dinas LHK Provinsi Kepri.....	112
Lampiran 4.8. Ijin Penelitian dari Dinas Provinsi Kepri.....	113
Lampiran 4.9. Permohonan Ijin Penelitian ke Polresta Bareleng	114
Lampiran 4.10. Ijin Penelitian dari Polresta Bareleng	115
Lampiran 4.11. Surat P.21 Berkas Pidana Kehutanan oleh Polresta Bareleng ...	116
Lampiran 4.12. Daftar Pertanyaan Penelitian	119

